



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke- 11 (sebelas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 20 September 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: Membahas mengenai Persetujuan Penetapan Penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM Penanggung Utang
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum mewakili Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Cipta Karya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah untuk membahas mengenai Persetujuan Penetapan Penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM Penanggung Utang.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI dapat memahami paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum tentang penghapusan piutang secara bersyarat kepada 5 PDAM penanggung utang sebagaimana tercantum dalam surat Presiden RI Nomor: R-37/Pres/07/2011 yaitu PDAM Kota Semarang, PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Bandung, PDAM Tirta Musi Palembang dan PDAM Kota Makasar dengan total nilai piutang non pokok sebesar Rp 1,044 Trilyun.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengkaji pemberian *reward* kepada 30 PDAM yang lancar dalam melakukan pembayaran utangnya sehingga memberikan stimulan kepada PDAM tersebut untuk terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung dalam rangka pendalaman ke 3 (tiga) PDAM yaitu PDAM Semarang, PDAM Palembang, dan PDAM Makasar.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Jakarta, 20 September 2011

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

ttd

IR. AGOES WIDJANARKO, MIP

KETUA RAPAT,

ttd

Ir. H. MULYADI